BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pulau Bali adalah salah satu Pulau kecil di Indonesia yang sangat terkenal dengan tradisi, budaya, adat istiadat dan aktivitas religius masyarakat setempat. Masyarakat Bali yang mayoritas adalah beragama Hindu sangat kental akan tradisi dan upacara keagamaannya. Kebudayaan Bali yang dijiwai oleh nilai-nilai agama Hindu melahirkan kebudayaan Bali yang bercorak *sosio-religius*. Hal ini sangat jelas terlihat pada masyarakat Bali yang sering melaksanakan ritual upacara agama, baik yang berhubungan dengan upacara agama Hindu maupun upacara adat setempat.

Warga lokal Bali pada umumnya tinggal pada sebuah perkumpulan atau komunitas tradisional yang dipimpin oleh seorang *kelian* atau ketua, tempat dari perkumpulan ini disebut dengan Desa Adat. Desa Adat merupakan ciri khas tata kehidupan masyarakat di Bali. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 yang berbunyi:

“Desa Adat adalah kesatuan hukum masyarakat di Bali yang memiliki wilayah kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun menurun dalam ikatan tempat suci (kahyangan tiga atau kahyangan desa), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.”

Berdasarkan pengertian Desa Adat diatas, diketahui bahwa suatu Desa Adat memiliki wewenang untuk mengatur jalan kehidupan masyarakatnya sendiri

sesuai dengan aturan yang dimiliki dan ditaati oleh masyarakat Desa Adat setempat. Desa Adat yang satu dengan Desa Adat yang lain memiliki tradisi dan aturan yang berbeda. Perbedaan tersebut terjadi karena adanya *dresta* atau hukum adat yang menjadi pedoman dan cara pandang masyarakat disetiap Desa Adat. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019, *dresta* adalah adat kebiasaan atau tradisi yang diwarisi secara turun temurun yang masih ditaati oleh Desa Adat. Keberadaan dari Sebuah *dresta* sangat dipengaruhi oleh *desa* (tempat), *kala* (waktu), *patra* (keadaan). Perbedaan *desa*, *kala*, *patra* (tempat, waktu dan keadaan) inilah yang menimbulkan keyakinan dan cara pandang yang berbeda pula disetiap wilayah Desa Adat.

Berbicara tentang keberadaan Desa Adat yang ada Bali, Saucana (2011) menjelaskan bahwa Desa di Bali dibedakan menjadi tiga jenis sebagai berikut:

1. Desa Bali *Aga* atau Desa Bali *Mula*

Desa Bali *Aga* merupakan Desa yang masih tetap menganut tradisi jaman Hindu Bali asli atau pra-Majapahit tanpa adanya pengaruh budaya Hindu Jawa yang berasal dari Majapahit.

2. Desa Bali *Apanage* atau Desa Bali Dataran

Desa Bali *Apanage* merupakan desa yang sistem kemasyarakatannya sudah dipengaruhi oleh tradisi dan budaya yang berasal dari Majapahit, seperti sistem perekonomian, sistem kepemimpinan dan stratifikasi sosial masyarakatnya.

3. Desa Anyar atau Desa Baru

Desa Anyar adalah Desa yang baru terbentuk karena adanya perpindahan atau transmigrasi penduduk dengan tujuan mencari penghidupan.

Desa Adat Tegenan yang dipilih sebagai tempat penelitian merupakan salah satu Desa Adat di Bali yang termasuk kedalam jenis Desa Bali *Apanage*. Tradisi, budaya dan tatanan pola kehidupan masyarakat di Desa adat Tegenan sudah terpengaruh dengan pola kemasyarakatan Majapahit seperti sistem perekonomian masyarakat yang didominasi oleh sawah dan irigasi, sistem kepemimpinan yang bersifat terpusat, adanya sistem kasta, menggunakan kalender Hindu-Jawa, dan adanya aturan-aturan yang tertulis dalam lontar yang masih ditaati sampai saat ini.

Salah satu tradisi unik yang dilaksanakan di Desa Adat Tegenan adalah dilaksanakannya upacara *ngusabha nini* di Pura Puseh yang merupakan salah satu pura Kahyangan Tiga. Upacara *ngusabha nini* adalah upacara yang dilaksanakan sebagai wujud *bhakti* terhadap *Idha Bathara Sri* yang *diniyaskan* atau disimbolkan sebagai *Bhatara Nini* yang telah melimpahkan keselamatan, kesejahteraan dan telah memberikan hasil panen yang melimpah kepada masyarakat di Desa Adat Tegenan. Terkait tradisi upacara *ngusabha nini*, Mangku Restu Selaku *kelian* atau ketua di Pura Puseh menjelaskan sebagai berikut:

“Cikal bakalnya *ngusabha nini* kami selaku *pengempon* Pura Puseh berusaha mencari data-data maupun lontar-lontar yang ada kaitannya dengan upacara *ngusabha nini*. Mengapa disebut *ngusabha nini*, karena di Desa Tegenan ini, sebagian besar masyarakatnya adalah petani padi. Kalau dilihat dari segi filosofinya *nini* ini adalah perwujudan dari hasil panen padi disawah, sehingga di dalam upacara *ngusabha nini* dibuatlah *tetandingan* dari padi yang masih tangkainya lalu dibentuk sedemikian rupa hingga berwujud *sri* atau *cili*.”

Berdasarkan pernyataan diatas diketahui bahwa *nini* merupakan simbol atau perwujudan dari hasil panen di sawah, khususnya di Desa Adat Tegenan yang masyarakatnya kebanyakan bekerja sebagai petani padi sehingga *nini* tersebut disimbolkan dalam bentuk *tandingan* (rangkaian) yang terbuat dari padi yang menyerupai bentuk Sri atau *cili* (simbol Dewi Sri).

Pelaksanaan upacara *ngusabha nini* di Desa Adat Tegenan dilaksanakan berlandaskan pada *dresta* yang selama ini telah menjadi adat kebiasaan masyarakat di Desa Adat Tegenan. Stratifikasi atau pengelompokan masyarakat Desa Adat Tegenan yang melaksanakan upacara ini dibedakan menjadi dua yaitu masyarakat sebagai *krama seket pengempon* Pura Puseh dan masyarakat sebagai *krama penyungsong* Pura Puseh. *Krama seket pengempon* Pura Puseh merupakan organisasi yang terdiri dari 50 anggota dan terbentuk karena adanya tanggung jawab atas tanah *ayahan* Desa. Adapun tugas dari *krama seket* ini adalah bertanggung jawab atas semua kegiatan yang dilaksanakan di Pura Puseh, dimana salah satunya adalah melaksanakan upacara *ngusabha nini*. Sedangkan *krama penyungsong* adalah *krama* atau masyarakat di Desa Adat Tegenan selain dari masyarakat yang menjadi anggota *krama seket*. *Krama penyungsong* ini berkewajiban untuk ikut berperan serta dalam pelaksanaan upacara *ngusabha nini* dalam hal *ngayah* (gotong royong) dan *berdana punia*.

Dalam pelaksanaan upacara *ngusabha nini* yang terdiri dari beberapa rangkaian upacara sudah pasti memerlukan dana yang besar. Mangku Restu selaku *kelian krama seket* menuturkan terkait sumber pemasukan dana *ngusabha nini* sebagai berikut:

“Untuk dana upacara *ngusabha nini* maupun *piodalan* di Pura Puseh kami mengupayakan dari iuran atau *urunan* dari *krama seket*. Kami memungut *urunan* sesuai dengan kebutuhan. Nah dana selain *urunan*, di pura puseh ada juga tanah *pelaba pura* yang istilahnya bisa *dipetinin* atau disewa. Apabila *odalan* atau *ngusabha* yang *metinin* ini atau yang menyewa *tanah* wajib membayar sesuai dengan berapa jumlah yang *dipetinin* dan dibayar mengikuti harga beras di pasar”.

Dari kutipan diatas diketahui bahwa sumber dana dalam upacara *ngusabha nini* sumber utamanya berasal dari *urunan* atau iuran wajib yang dikenakan kepada *krama seket*. Sumber dana kedua berasal dari hasil sewa tanah *pelaba pura* yang *dipetinin* atau disewa oleh *krama*. Besarnya bayaran atas petinan tanah *pelaba pura* disesuaikan dengan harga beras dipasaran. Selain dana yang berasal dari *krama seket* sebagai sumber dana internal, *krama penyungsong* juga ikut memberikan masukan dana berupa sumbangan atau *dana punia* sebagai sumber dana eksternal. Hal tersebut dipertegas kembali oleh Mangku Restu selaku *kelian krama seket* sekaligus *kelian* Pura Puseh sebagai berikut:

“Selain itu, dari LPD juga memberikan sumbangan setiap *odalan* atau *ngusabha* karena LPD meminjam tanah *pelaba pura* puseh untuk membangun kantor sehingga pihak LPD sepakat untuk memberikan sumbangan khusus untuk upacara yang dilaksanakan di Pura Puseh. Dari *krama panyungsong* juga ada dana yang masuk berupa *dana punia* baik dalam bentuk barang maupun jasa dan *sesari* dari *pemedek*”.

Di lihat dari sumber pemasukan dana dalam upacara *ngusabha nini* yang berasal dari *krama seket* sebagai sumber internal dan dari *krama penyungsong* sebagai sumber eksternal, tentu harus diimbangi dengan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel serta adanya praktik akuntansi yang baik agar dapat terhindar dari adanya kecurangan dan penyelewengan. Adapun tujuan dari adanya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan upacara *ngusabha nini* adalah untuk mendapatkan kepercayaan dari

masyarakat atau *krama* sehingga pelaksanaan upacara *ngusabha nini* dapat terlaksana dengan baik.

Organisasi Desa adat seperti halnya organisasi *krama seket* bukanlah organisasi resmi yang diakui oleh pemerintah dan diatur dalam peraturan tertentu. Organisasi ini hanya diakui oleh masyarakat di Desa Adat Tegenan dan dijalankan sesuai dengan *dresta* atau aturan yang telah menjadi adat kebiasaan masyarakat di Desa Adat Tegenan. Namun apabila dilihat dari segi kepemilikan organisasi, sumber dana, dan aktivitas yang dilakukan, organisasi ini termasuk kedalam organisasi publik yang bersifat non-komersial atau nirlaba.

Organisasi nirlaba menurut PSAK No. 45 (2011) memiliki karakteristik yang berbeda dengan organisasi laba. Perbedaan utamanya terdapat pada cara organisasi memperoleh sumber daya yang digunakan untuk melakukan aktivitas operasionalnya. Organisasi nirlaba lebih banyak memperoleh dana melalui sumbangan dari anggota dan dari donatur lain. Sama halnya seperti organisasi lain, organisasi nirlaba juga dituntut untuk dapat memberikan pertanggungjawaban mereka dengan menyajikan laporan keuangan secara transparan dan akuntabel.

Para donatur mengisyaratkan agar pengelola membuat pelaporan pengelolaan keuangan. Hal tersebut dilakukan karena sekarang ini sangat sering terjadi kasus penyelewengan pada organisasi nirlaba khususnya pada organisasi keagamaan. Seperti dilansir dari Detik.com oleh Ulfah (2018), bahwa semakin maraknya kasus penyelewengan dana dari donatur yang terjadi, menyebabkan donatur lebih berhati-hati dan menuntut adanya sebuah laporan yang akuntabel dan transparan. Hal ini juga didukung oleh laporan Marquet (dalam Ulfah, 2018)

pada kasus penggelapan di Amerika Serikat. Laporan tersebut menjelaskan bahwa organisasi nirlaba khususnya organisasi keagamaan melakukan penggelapan sebanyak seperdelapan dari insiden penggelapan utama. Dari skandal tersebut diketahui bahwa pengelolaan keuangan organisasi kurang transparan dan akuntabilitasnya masih sangat minim menjadi penyebab utama dari kasus penggelapan.

Transparansi dan Akuntabilitas menjadi tuntutan yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan organisasi nirlaba. Menurut Mardiasmo (2009) Transparansi berarti adanya keterbukaan oleh pemerintah dalam memberikan informasi terkait aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Informasi tersebut nantinya akan digunakan oleh pemangku kepentingan atau *stakeholder* untuk mengambil suatu keputusan. Sedangkan Akuntabilitas merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (Mardiasmo, 2009). Untuk mengurangi tingkat terjadinya penyelewangan maka organisasi harus melakukan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang baik akan dapat meningkatkan kontrol dan pengendalian sehingga suatu kecurangan dan penyelewangan akan lebih susah untuk dilakukan.

Pengelolaan keuangan upacara *ngusabha nini* di Desa Adat Tegenan yang dikelola oleh *krama seket* perlu melakukan pembukuan dan pelaporan keuangan dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang baik. Adanya laporan keuangan yang handal dan relevan sangat diharapkan sebagai wujud

pertanggungjawaban pengelola kepada *krama* sebagai pemangku kepentingan, sehingga persepsi negatif yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan oleh *krama seket* dapat dihindari. Berdasarkan informasi yang didapatkan peneliti, bahwa *krama seket* dalam mengelola keuangan upacara *ngusabha nini* dilakukan dengan pencatatan sederhana atau *single entry* dan tidak membuat laporan keuangan sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban. *Juru raksa* atau bendahara *krama seket* juga masih melakukan rangkap kerja yaitu sebagai pencatat sekaligus yang membawa uang yang sudah terkumpul. Selain itu organisasi *krama seket* sistem kepengurusannya bersifat tunggal atau seumur hidup dan diwariskan secara turun-temurun, dimana dalam sistem pemerintahan terpusat seperti ini akan lebih cenderung terjadinya suatu penyelewengan.

Walaupun tidak dibuatnya laporan keuangan oleh *prajuru krama seket* selaku pengelola keuangan dan masih adanya rangkap kerja yang dilakukan oleh bendahara. Selama ini tidak pernah ada persepsi negatif atau protes dari masyarakat terkait dengan realisasi dan pengelolaan keuangan dari dana yang mereka sumbangkan baik dalam bentuk *peturunan* maupun *dana punia*. Masyarakat Desa Adat Tegenan baik anggota *krama seket* maupun *krama penyung* tetap mau membayar *peturunan* dan *berdana punia*, terkait hal tersebut tentu ada prinsip dan nilai yang dipegang teguh sehingga terciptanya suatu kepercayaan yang baik antara masyarakat dan pengelola. Dengan demikian sangat menarik untuk diungkap bagaimana proses dari pengelolaan keuangan upacara *ngusabha nini* yang dilakukan oleh *krama seket* dengan dilandasi *dresta* yang selama ini menjadi pedoman dan prinsip hidup masyarakat di Desa Adat Tegenan serta transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan upacara

ngusabha nini oleh *krama seket* sehingga bisa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

Penelitian ini mengarah pada penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2014) dimana penelitiannya berjudul “Membedah Praktik Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan *Desa Pakraman* Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali.” Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam praktik pengelolaan keuangan penerapan akuntabilitas dalam *Desa Pakraman* modal utamanya adalah kepercayaan dari *krama*, dimana kepercayaan tersebut digunakan untuk meningkatkan hubungan akuntabilitas antara pengurus dengan *krama*. Penelitian yang relevan juga dilakukan oleh Handayani (2017) yang berjudul “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Pada Sistem *Dana Punia* di *Desa Pakraman* Bangkang, Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali.” Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa dalam pengelolaan keuangan *krama* terlibat secara langsung, pertanggungjawaban *prajuru* sebagai bentuk akuntabilitas disampaikan secara lisan kepada *krama* dan sudah sesuai dengan unsur-unsur akuntabilitas yang ada.

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian relevan lainnya adalah 1) Penelitian ini dilakukan di Desa Adat Tegenan yang merupakan salah satu desa *Apanage* di Bali yang memiliki *dresta* atau aturan dan tradisi unik yang berbeda dari Desa Adat lainnya. 2) Penelitian ini memfokuskan pada aspek pengelolaan keuangan serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan oleh *krama seket* dalam mengelola keuangan upacara *ngusabha nini* yang dilandasi *dresta* yang selama ini menjadi pedoman dan prinsip hidup masyarakat di Desa Adat Tegenan sehingga dalam proses pengelolaan

keuangannya akan memiliki perbedaan dan keunikannya sendiri dibandingkan dengan di Desa Adat lain baik dari proses perencanaan, proses pelaksanaan dan proses pertanggungjawabannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “**Mengungkap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Upacara *Ngusabha Nini* Yang Dilandasi *Dresta* Desa Adat Tegenan.**”

1.2 Identifikasi Masalah

Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip yang sangat penting untuk diterapkan agar dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam proses pengelolaan keuangan khususnya dalam organisasi sektor publik atau organisasi nirlaba, dibuatnya laporan keuangan merupakan salah satu syarat agar terwujudnya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Dengan adanya laporan keuangan tersebut maka masyarakat dalam hal ini sebagai pemangku kepentingan akan lebih percaya terhadap pengelolaan keuangan yang telah dilakukan oleh pengelola.

Seperti halnya pengelolaan keuangan upacara *ngusabha nini* oleh *krama seket* yang merupakan salah satu organisasi yang dimana pelaksanaan kegiatannya masih mengikuti *dresta* atau adat kebiasaan masyarakat Desa Adat Tegenan. Sumber dana yang dikelola dalam upacara *ngusabha nini* berasal dari masyarakat, dengan demikian *krama seket* tentu harus membuat pelaporan keuangan agar masyarakat percaya terhadap pengelolaan keuangan yang telah dilakukan. Namun selama ini *prajuru krama seket* sebagai pengelola tidak membuat laporan keuangan dan masih adanya rangkap kerja yang dilakukan oleh bendahara, tetapi

masyarakat tetap memberikan kepercayaan kepada *krama seket* untuk mengelola keuangan tersebut tanpa ada persepsi negatif maupun protes dari masyarakat. Dengan demikian sangat menarik untuk diungkap bagaimana proses dari pengelolaan keuangan upacara *ngusabha nini* yang dikelola oleh *krama seket* dengan dilandasi *dresta* yang selama ini menjadi pedoman dan prinsip hidup masyarakat di Desa Adat Tegenan, serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengelolaan keuangan upacara *ngusabha nini* sehingga bisa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan juga dapat mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dilakukan agar peneliti fokus pada pokok permasalahan yang ada beserta pembahasannya, sehingga diharapkan penelitian ini tidak menyimpang dari tujuan yang ingin dicapai. Adapun fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah terkait dengan pengelolaan keuangan upacara *ngusabha nini* oleh *krama seket* yang dilandasi dengan *dresta* atau adat kebiasaan masyarakat Desa Adat Tegenan, serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan oleh *krama seket* dalam proses perencanaan, proses pelaksanaan dan proses pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan upacara *ngusabha nini*.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan pada latar belakang dan identifikasi masalah maka peneliti menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pengelolaan keuangan upacara *ngusabha nini* yang dilandasi *dresta* Desa Adat Tenganan oleh *krama seket*?
2. Bagaimana transparansi dalam proses pengelolaan keuangan upacara *ngusabha nini* yang dilandasi *dresta* Desa Adat Tenganan oleh *krama seket*?
3. Bagaimana akuntabilitas dalam proses pengelolaan keuangan upacara *ngusabha nini* yang dilandasi *dresta* Desa Adat Tenganan oleh *krama seket*?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui proses pengelolaan keuangan upacara *ngusabha nini* yang dilandasi *dresta* Desa Adat Tenganan oleh *krama seket*.
2. Mengetahui transparansi dalam proses pengelolaan keuangan upacara *ngusabha nini* yang dilandasi *dresta* Desa Adat Tenganan oleh *krama seket*.
3. Mengetahui akuntabilitas dalam proses pengelolaan keuangan upacara *ngusabha nini* yang dilandasi *dresta* Desa Adat Tenganan oleh *krama seket*.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penulis maupun bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap penelitian ini. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan kajian bagi penelitian selanjutnya serta dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan proses pengelolaan keuangan pada organisasi nirlaba yang masih bersifat tradisional seperti organisasi *krama seket* serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan yang dilandasi dengan *dresta* atau hukum adat yang dimiliki oleh masing-masing Desa adat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori akuntansi khususnya pada akuntansi sektor publik terkait pengelolaan keuangan pada organisasi nirlaba yang masih bersifat tradisional serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan aturan yang menjadi landasan dalam pengelolaan keuangan tersebut.

b. *Krama Seket*

Sebagai masukan atau saran kepada *krama seket* selaku pengelola dan pelaksana pengelolaan keuangan agar tetap menerapkan dan memahami pentingnya prinsip transparansi dan akuntabilitas agar dapat mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel sehingga terhindar dari protes maupun persepsi negatif masyarakat.

c. *Krama Penyungung*

Dapat menambah wawasan masyarakat di Desa Adat Tegenan yang merupakan *stakeholder* atau pemangku kepentingan dalam pengelolaan keuangan upacara *ngusabha nini* sehingga mengetahui transparansi dan akuntabilitas yang telah dilakukan oleh pengelola keuangan yang dalam hal ini adalah *prajuru krama seket*.

d. Peneliti

Sebagai wadah untuk mengembangkan dan menambah wawasan terkait ilmu akuntansi khususnya dalam bidang akuntansi sektor publik yang dalam penelitian ini mengenai proses pengelolaan keuangan upacara *ngusabha nini* yang dikelola oleh *prajuru krama seket* serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan oleh pengelola keuangan sesuai dengan aturan yang menjadi *dresta* atau hukum adat di Desa Adat Tegenan.

e. Bagi Peneliti Lain

Sebagai bahan untuk melengkapi penyediaan tambahan bacaan, serta dapat dijadikan referensi bagi rekan-rekan mahasiswa dan pihak lain yang melakukan penelitian dengan tema dan permasalahan yang sama yaitu terkait pengelolaan keuangan pada organisasi nirlaba serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan aturan yang berlaku pada tempat penelitian.